

Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang

¹Fajriharish Nur Awan, ²Badaruddin, ³Miswar Budi Mulya

¹²³Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
e-mail: miswarbm_ikl@yahoo.com

Abstrak

Aktivitas penambangan pasir di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dinilai menimbulkan kerusakan lingkungan seperti abrasi dan merusak biota laut. Hal ini memicu timbulnya konflik sosial masyarakat yang perlu untuk dikaji terutama terkait penyebab konflik atau resistensi sosial masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus pada konflik sosial masyarakat pesisir terhadap adanya penambangan pasir laut di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta observasi lapangan. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari dokumen instansi terkait sebagai penunjang data primer. Penyebab terjadinya konflik sosial masyarakat yaitu perbedaan antar individu dalam hal pemahaman dan reaksi terhadap masalah, perbedaan kepentingan dimana pelaku usaha mengutamakan keuntungan sedangkan masyarakat mengutamakan kerusakan lingkungan yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Selain itu juga perubahan sosial dalam hal musyawarah desa. Penyebab terjadinya konflik masyarakat pesisir penambangan pasir laut yaitu perbedaan antar individu, kepentingan, dan perubahan sosial.

Keywords: Konflik sosial masyarakat, pesisir pantai, penambangan pasir.

Abstract

Sand mining activities in Labu Beach, Deli Serdang are considered to cause environmental damage such as abrasion and harm marine life. This triggers the emergence of social conflict that needs to be studied, especially related to the cause of conflict or social resistance. This study is a qualitative research using case study on social conflict in coastal communities towards the sea sand mining existence in Labu Beach, Deli Serdang. The primary data obtained from the results of in-depth interviews with stakeholders and field observations. Meanwhile, secondary data is obtained from related agency documents as supporting primary data. The causes of community social conflict are differences between individuals in terms of understanding and reaction to problems, differences in interests where the business actors prioritize profits while the community prioritizes environmental damage that results in a decrease in community income. In addition, there are also social changes in village consultations. The causes of conflict in coastal communities of sea sand mining are differences between individuals, interests and social change.

Kata Kunci : Community social conflicts, coastal areas, sand mining.

1. PENDAHULUAN

Penambangan pasir adalah salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan untuk mengambil sejumlah besar pasir di pantai yang memiliki nilai jual tinggi. Dharmawan (2006) menyebutkan bahwa kegiatan penambangan bersifat strategis bagi suatu daerah dalam meningkatkan sektor industri dan perekonomian. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan adanya aktivitas penambangan pasir di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti abrasi dan merusak biota laut. Hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat pesisir pantai yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Konflik sosial menjadi isu yang perlu diangkat sebagai topik penelitian karena begitu dinamis mengingat setiap individu dalam masyarakat memiliki sikap berbeda dalam menghadapi sebuah masalah. Penyebab konflik sosial (resistensi masyarakat) yang mungkin paling berpengaruh pada masalah penambangan pasir laut di pantai labu adalah perbedaan kepentingan terutama antara pihak perusahaan yang cenderung berorientasi pada keuntungan dengan masyarakat yang merasa dirugikan. Perbedaan antar individu, budaya, kepentingan, sosial dan ekonomi merupakan penyebab terjadi resistensi sosial masyarakat (Soekanto, 2006). Resistensi dalam sosiologi menurut Muslimin (2015) adalah suatu perlawanan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun diam-diam atas kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan dalam suatu pihak di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, konflik sosial masyarakat perlu untuk dikaji terutama terkait penyebab konflik atau resistensi sosial masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab konflik atau resistensi sosial masyarakat terhadap penambangan pasir laut di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa negara Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, khususnya pada pertambangan. Pertambangan merupakan serangkaian aktifitas dalam pencarian, pengambilan, pengolahan hingga penjualan bahan galian seperti batubara, pasir besi, biji timah, tembaga, emas dan lain sebagainya. Kegiatan pengolahan hasil pertambangan tidak termasuk aktifitas pertambangan melainkan digolongkan ke dalam kegiatan industri. Kegiatan ini merupakan salah satu sektor besar yang memberikan peluang yang menjanjikan untuk pembangunan suatu daerah. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan yang memiliki tujuan yang lebih baik dan bernilai (Yandra, 2016). Industri pertambangan sendiri merupakan satu dari industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan kesejahteraan. Yudhistira, Hidayat & Hadiyanto (2011) mengatakan bahwa industri pertambangan selain mendatangkan devisa bagi negara, juga dapat membuka lapangan kerja bagi kabupaten dan kota yang mana sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun dibalik banyaknya manfaat industri pertambangan yang mendatangkan keuntungan bagi negara, maraknya kegiatan ini di Indonesia justru menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yaitu kerusakan lingkungan. Ma'rifah dan Nawiyanto (2014) menyatakan bahwa kegiatan pertambangan sangat beresiko terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan adanya kegiatan pertambangan yang kian bertambah, sebagai contoh penambangan pasir di pantai yang akan menyebabkan abrasi dan merusak biota laut. Munandar dan Kusumaawati (2017) mendefenisikan abrasi sebagai, "Kerusakan garis pantai akibat lepasnya material pantai yang terus menerus dihantam oleh gelombang laut atau terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai atau hilangnya daratan di wilayah pesisir". Mereka juga menambahkan bahwa fenomena abrasi disebabkan oleh faktor alami dan manusia.

Sebagaimana yang dapat diketahui dari tahun ke tahun kerusakan sumber daya alam terus meningkat dan tentu saja, sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan akan merasa dirugikan lalu menimbulkan konflik sosial. Konflik bisa terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, perusahaan dengan masyarakat dan antar masyarakat itu sendiri (Ma'rifah dan Nawiyanto, 2014). Pada

kasus yang terjadi di Deli Serdang, tepatnya di pantai Labu, konflik yang timbul yaitu antara masyarakat dan perusahaan yang seolahnya memikirkan keuntungan mereka dan tidak memikirkan akibatnya pada masyarakat sekitar. Sangat disayangkan sekali jika hal ini masih saja terjadi. Seharusnya antara perusahaan yang melakukan pertambangan dan masyarakat sama-sama mendapat keuntungan, mengingat masyarakat berhak menerima pelayanan publik yang baik dan berkualitas (Yandra dan Utami, 2019).

Masalah seperti konflik sosial seperti ini perlu dikaji mengingat bahwa diadakannya pertambangan di sekitar suatu daerah juga atas izin pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Karena, masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan, maka masyarakat pun harus diikutsertakan dalam pembangunan tersebut karena tujuan akhir yang akan dicapai adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Yandra, 2016). Akan tetapi, yang terjadi di lapangan, tidak sesuai dengan harapan. Masyarakat dirugikan, kelestarian lingkungan diabaikan. Maka dari itu, masyarakat yang merasa dirugikan akan mengambil tindakan atau melakukan perlawanan (resistensi) dengan maksud keluhan mereka dapat didengar dan perusahaan ataupun pihak yang melakukan pertambangan dapat mempertimbangkan kegiatan tersebut dihentikan. Fenomena konflik sosial masyarakat ini perlu dikaji oleh peneliti guna melihat penyebab konflik atau resistensi sosial masyarakat

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus pada konflik sosial masyarakat pesisir terhadap adanya penambangan pasir laut di pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian studi kasus dilakukan untuk menyelidiki secara cermat suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang lengkap (Creswell, 2012). Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta observasi lapangan. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari dokumen instansi terkait sebagai penunjang data primer.

Penelitian dilakukan di Desa Paluh Sibaji, Pantai Labu Pekan, Rugemuk, dan Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Alasan lokasi ini dipilih penulis karena desa-desa tersebut yang langsung terkena dampak dari kegiatan penambangan pasir laut dan penulis ingin mengetahui konflik sosial masyarakat antara pengusaha penambang pasir laut dan masyarakat sekitar Pantai Labu.

Cara penentuan atau pemilihan informan dilakukan dengan metode purposeful sampling dan snowball sampling. Metode purposeful sampling dilakukan dengan menentukan informan penelitian atas pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan masing – masing informan penelitian yang dinilai memiliki pengetahuan dan pemahaman pada konflik sosial masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir sesuai dengan tema penelitian. Metode snowball sampling adalah penentuan informan lain berdasarkan rekomendasi informan pertama jika data yang diperoleh belum lengkap (Creswell, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab konflik sosial (resistensi) masyarakat terhadap penambangan pasir laut yang terjadi di Pantai Labu dilatarbelakangi oleh sebagai berikut:

1. Perbedaan antar individu

Pada dasarnya setiap individu memiliki pendirian dan perasaan berbeda yang mungkin akan melahirkan bentrokan antar individu khususnya dalam menyikapi masalah penambangan pasir. Ada

kelompok individu yang merasa dirugikan karena merasa lingkungannya rusak akibat penambangan pasir tetapi ada juga kelompok individu yang tidak merasa dirugikan.

Hal ini diungkapkan oleh Cak Dogol:

“Saya nggak paham orang-orang ini ada yang sepemahaman dengan saya. Tapi ada juga yang nggak peduli lingkungan, nggak merasa apa-apa katanya, nggak ada efeknya buat mereka. Padahal sudah jelas rusak dibuatnya daerah sini karena penambangan pasir itu.” (Wawancara pada 22 Juni 2019 pukul 10.00).

2. Perbedaan kepentingan

Penyebab utama terjadi resistensi sosial masyarakat adalah perbedaan kepentingan di mana individu akan berkelompok sesuai dengan kesamaan kepentingan dan akan terjadi konflik dengan kelompok lain yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pada penelitian konflik sosial antara masyarakat dengan penambang pasir secara nyata terlihat bahwa kepentingan masyarakat adalah menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan penurunan hasil tangkapan laut yang berdampak pada penurunan pendapatan. Sedangkan pihak penambang pasir memiliki kepentingan bisnis sebagai upaya menguntungkan perusahaan penambang pasir. Sehingga terjadi resistensi sosial antara kedua belah pihak yang cukup alot dan berkepanjangan.

Bapak Nazarudin mengungkapkan:

“Sampai kapanpun saya akan menuntut hak saya. Dulu saya punya tanah yang dijadikan pondok di sekitar kawasan pantai tapi sudah tidak ada lagi akibat dari abrasi. Nggak akan akur saya dengan penambang pasir itu, kalau mereka kan cuma mau untungnya saja.” (Wawancara pada 30 Juni 2019 pukul 14.00)

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan kepentingan dapat diamati dalam empat kasus sebagai berikut:

- a) Kapal keruk ketika melakukan aktivitas pengerukan tidak melakukan pengelolaan lumpur sehingga berdampak terhadap nelayan seperti terjadinya alat tangkap nelayan yang tertimbun lumpur, kemudian lumpur berserakan sehingga menimbulkan pengeruhan air laut dan busuknya air laut. Akhirnya biota laut habis, dan hasil laut tidak ada.
- b) Pihak pemeraksa tidak memberikan rambu-rambu ketika melakukan aktivitas pengerukan pasir laut serta tanda-tanda lain bahwa sedang ada proyek pekerjaan di laut sehingga banyak terjadi pelanggaran alat tangkap nelayan baik berupa jarring maupun yang lainnya.
- c) Kemudian pemeraksa tidak menyerap tenaga kerja lokal seperti masyarakat nelayan yang mampu mengawasi ketika kapal beraktivitas. Contoh tidak adanya perwakilan masyarakat di Kapal KM. HAM 310 sehingga diduga terjadinya pencurian pasir laut di luar titik koordinat dan kemungkinan lebih leluasa pemeraksa melebihi kubikasi sesuai dengan kebutuhan sesuai kontrak. Karena kapal KM Ham 310 semua jenis makanan yang di kapal tidak dapat dimakan oleh perwakilan masyarakat.
- d) Ketika masyarakat meminta ganti rugi akibat kapal keruk menabrak alat tangkap nelayan rentang waktunya terlalu lama dan harus sesuai SOP. Sementara pihak pemeraksa tidak pernah mensosialisasikan bagaimana SOP-nya.

Keempat poin tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Zulkarnain dan Pak Suwardi , *“sebetulnya saya tidak terkena dampak langsung, tinggal juga jauh. Tetapi kami ini kan hidup bersama pastilah tahu. Pihak pemeraksa itu merusak lingkungan, merusak juga alat tangkap nelayan tapi tidak solusi, seharusnya bisa juga mereka rekrut saja orang-orang sini. Tapi pihak pemeraksa hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri”* (Wawancara pada 30 Juni 2019 pukul 10.00).

3. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang terjadi menurut hasil penelitian yaitu perubahan kebiasaan musyawarah yang biasa dilakukan oleh Desa tetapi tiba-tiba saja berubah. Hal ini yang memicu terjadinya konflik sosial antara masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan menjadi menurun dengan adanya perubahan tersebut. Masyarakat menjadi khawatir bahwa pemangku kebijakan telah berpihak kepada perusahaan penambang pasir. Kesepakatan dibuat tanpa sepengetahuan masyarakat dan sosialisasi tidak pernah sampai kepada masyarakat.

Cak Dogol mengungkapkan bahwa dulu musyawarah dilakukan melalui pertemuan-pertemuan masyarakat tetapi berubah, Ia yang merasa aktif sudah tidak tahu menahu lagi dan tidak diajak dalam pertemuan:

“Saya selalu aktif dulu ikut dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah penolakan penambangan pasir, Bang. Tapi ntah sekarang ndak sampai ke saya kalau ada apa-apa. Tahunya ya sudah diputuskan begitu saja” (Wawancara pada 22 Juni 2019 pukul 10.00).

4. KESIMPULAN

Penyebab terjadinya konflik sosial (resistensi) masyarakat terhadap penambangan pasir laut yang terjadi di Pantai Labu adalah perbedaan antar individu dalam hal pemahaman dan reaksi terhadap masalah, kepentingan terkait pelaku usaha mencari keuntungan dan masyarakat yang menuntut ganti rugi, perubahan sosial dalam hal musyawarah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan ilmu dalam mengkaji konflik sosial yang terjadi akibat penambangan pasir laut dan dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan agar pimpinan memberikan pemahaman bahwa Disiplin merupakan alat untuk komunikasi pimpinan agar pegawai bersedia mengubah perilakunya sebagai upaya meningkatkan kesadaran dengan kegiatan mensosialisasikan bahwa disiplin dapat meningkatkan kinerja secara sadar PNS. Secara teoritis hasil penelitian disiplin pegawai ini dapat menjadi bahan bagi peneliti berikutnya dalam meneliti disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pada Birokrasi Pemerintahan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Antoro, Kus S. (2010). Konflik-konflik sumberdaya alam di kawasan penambangan pasir besi: studi implikasi otonomi daerah (studi kasus di kabupaten Kulon Progo provinsi daerah istimewa Yogyakarta). [tesis]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. 149 hal.
- [2] As' ari, R., dkk (2019). Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. *JURNAL GEOGRAFI*, 11(2), 171-181.
- [3] Astuti, E. Z. L. (2012). Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(1), 62-74.

-
- [4] Baiquni, M., & Rijanta, R. (2007). Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya dalam Era Otonomi dan Transisi Masyarakat. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 7(1).
- [5] Deddy Mulyana. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- [6] Dharmawan A.H. (2006). Mewujudkan Good Ecological Governance Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. Bogor
- [7]_____. (2007). Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif Dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan Dan Ekologi Politik. Sodality. Bogor
- [8] Denzin, Norman, K. (1970). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. Aldine Publishing Company, Chicago.
- [9] Fisher, Simon, dkk. (2001). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak, Alih Bahasa S. N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- [10] Francis, Diana. (2006). Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial. Yogyakarta: Quills.
- [11] Hess, C. E. E., & Fenrich, E. (2017). Socio-environmental conflicts on hydropower: The São Luiz do Tapajós project in Brazil. *Environmental science & policy*, 73, 20-28.
- [12] HS Salim. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta:Sinar Grafika.
- [13] Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42.
- [14] Isabrin, F. (2013). Dampak Rencana Penambangan Pasir Besi Terhadap Kondisi Sosial Petani Lahan Pantai Di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. *Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 11(1).
- [15] Kartikasari SN. (2001). Mengelola Konflik. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
- [16] Rizky Komorina, S. A. V. O. N. D. A. (2017). Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Tentang Rencana Pembangunan Apartemen dan Mall. *Paradigma*, 5(1)..
- [17] Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:Gramedia Indonesia.
- [18] Ma'rifah, S. R., & Nawiyanto, N. (2014). Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wogalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011. *Publika Budaya*, 2(1), 85-92.
- [20] Manalu D. 2009. Gerakan sosial dan perubahan kebijakan publik (studi kasus gerakan perlawanan masyarakat batak vs PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara). Yogyakarta [ID]: Gadjah Mada University Press. 326 hal.
- [21] Miles dan Huberman, 2002. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI PRESS.

- [22] Munandar, M., & Kusumawati, I. (2017). Studi analisis faktor penyebab dan penanganan abrasi pantai di wilayah Pesisir Aceh Barat. *Jurnal Perikanan Tropis*, 4(1), 47-56.
- [23] Musfiroh, M. R. (2016). Esensi Hukum dan Keadilan Masyarakat; Studi Kasus Tambang Pasir Besi di Desa Bandungharjo. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(1), 38-52.
- [24] Muslimin, I. 2015. Resistensi Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembangunan Mall Dinoyo City (Studi Di Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang). Malang
- [25] Nawawi, Hadari. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- [26] Nurhaedah, M., & Purwanti, R. (2013). Konflik pada kawasan taman nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan upaya penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3), 186-198.
- [27] Poloma M.(2007). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [28] [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- [29] Pruitt, Dean G & Jeffrey Z. R. (2004). Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [30] Raharja S. (2011). Pendidikan Berwawasan Ekologi: Pemberdayaan Lingkungan Sekitar untuk Pembelajaran. Yogyakarta: UNY Press.
- [31] Rahmad R (2016) Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Strategi Pengelolaan Pesisir Purworejo –Jawa Tengah (Studi Kasus: Areal Bekas Penambangan PT ANTAM). *Jurnal Geografi*, 8(1).
- [32] Rosady R. (2003). Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [33]Sanafiah F. (2005). Format-format Penelitian Sosial. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- [34]Satria A. (2009). Ekologi politik nelayan. Yogyakarta [ID]: LKiS. 411 hal.
- [35]Scoot J. (2000). Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah; Bentuk-Bentuk Resistensi Sehari-Hari Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [36]Soemarwoto O. (1997). Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan. Jakarta [ID]: Djambotan. 381 hal.
- [37]Soerjono S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [38]Suharismi A. (1993). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta:Rineka Cipta.

- [39] Wahyudin, Y. (2003). Sistem sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. *Makalah disampaikan pada pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, tanggal, 5.*
- [40] Wirawan. (2010). Konflik dan Manajemen Konflik. Jakarta: Salemba Humanika.
- [41] Yandra, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Pekanbaru 2012-2017. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 48-58.
- [42] Yandra, A., & Utami, B. C. (2018). Anomali Kepentingan Elit Dalam Kebijakan Public Privat Partnership (Ppp) Di Kota Pekanbaru.
- [43] Yudhistira, Y., Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2011). Kajian dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di Desa Keningar daerah kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(2), 76-84.